



SUMBER BERITA

RABU, 23 OKTOBER 2019

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Lagi, Kejari Ukur Lahan Hibah

**Lengkapi Data
Penyidikan**

BENGKULU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu kembali melakukan pengukuran ulang lahan hibah Pemkot Bengkulu di Kelurahan Bentiring, kemarin (22/10). Pengukuran kali ini atas permintaan BPN Kota Bengkulu dikarenakan adanya data yang kurang pada hasil pengukuran sebelumnya.

Lahan yang diukur ulang keseluruhan lahan hibah Pemkot yakni seluas 62,9 hektare di Perumahan Korpri, Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu. Penyidikan ini memastikan ketepatan jumlah lahan yakni seluas 8,6 hektare dari 62,9 hektare yang diduga telah dijual oknum masyarakat.

Plh Kajari Bengkulu, Oktalian Darmawan, SH, MH yang memimpin pengukuran ulang lahan ditemui **RB** di lokasi

mengatakan pengukuran dilakukan di sekitar 10 titik. Sebelumnya penyidik dan BPN sudah melakukan pengukuran namun dikarenakan adanya kekurangan data, maka pengukuran lahan kembali dilakukan.

Adapun semua alat pengukuran berasal dari BPN yang mana nanti hasil ini akan digunakan dalam rangkaian tahap penyidikan kasus dugaan penjualan aset lahan hibah Pemkot tersebut. "Ya sebelumnya kan kita sudah melakukan pengukuran, namun BPN meminta untuk dilakukan pengukuran ulang lagi di 10 titik untuk lebih memastikan hasilnya," ungkap Oktalian.

Ia menambahkan, penyidik juga membutuhkan data peta lapangan untuk menelusuri luas lahan yang dijual sebesar 8,6 hektare pada tahun 2015 lalu. "Jalannya penyidikan masih cukup panjang hingga penetapan tersangka. Hal itu mengingatkan penyidik fokus memenuhi point-point hasil

ekspose dengan BPKP Bengkulu terkait penghitungan kerugian negara," sampainya.

Lebih jauh disampaikan Oktalian, untuk menguatkan alat bukti yang sudah ada penyidik saat ini tengah mengurutkan konteks peristiwa dari awal hingga terjadinya proses penjualan lahan. Menggali informasi siapa oknum yang melakukan penjualan aset karena pemerintah tidak pernah menghimbau ke masyarakat. "Seluruhnya ada 28 titik lahan yang telah dijual. Kita secara bertahap menguraikan kasus ini," tutupnya.

Dibagian lain Kejari juga menunggu hasil penilaian Appraisal Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). Tim dari KJPP Jakarta dijadwalkan hari ini (23/10) turun langsung ke lokasi. Hasil dari penilaian KJPP akan disandingkan dengan hasil penilaian BPKP sehingga nantinya akan didapati hasil perhitungan kerugian negara. **(cup)**